

KOENTJARANINGRAT MEMORIAL LECTURE XI/2014 Pangeran Diponegoro (1785-1855) & Masalah Kepemimpinan Nasional¹

Senin, 19 Mei 2014, 09:00 – 12:00

Auditorium Gedung X, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia – Depok

Diponegoro Dalam Sejarah Nasional Indonesia²

Bondan Kanumoyoso

Departemen Sejarah FIB UI

Pendahuluan

Diantara para tokoh sejarah Indonesia dari awal abad 19, Diponegoro merupakan salah satu tokoh yang paling banyak mendapat perhatian. Ada banyak kajian yang ditulis tentang sejarah kehidupan dan perjuangan Diponegoro. Mulai dari artikel untuk jurnal ilmiah, skripsi, tesis, disertasi dan bahkan karya komprehensif yang terdiri dari tiga jilid.³ Berbagai aspek kehidupan Diponegoro telah dikupas sampai mendalam, mulai dari latar belakang keluarga, pendidikan agamanya, alasannya melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial, strategi perjuangannya, sampai dengan masa pembuangannya yang lamanya dua puluh lima tahun. Dengan adanya berbagai kajian tersebut dapat dikatakan bahwa Diponegoro adalah salah satu tokoh sejarah Indonesia yang perjalanan hidupnya telah diungkap secara luas.

Perlawanan yang dilakukan Diponegoro yang disebut dengan Perang Jawa (1825-1830) merupakan perlawanan terbesar terhadap pemerintah kolonial di Jawa pada awal abad 19. Sejarawan Peter Carey menyebut perlawanan Diponegoro merupakan penanda diakhirinya tatanan lama di Jawa dan dimulainya jaman modern. Dalam pengertian ini Perang Jawa dapat dikatakan sebagai bagian dari perubahan besar yang melanda dunia di akhir abad 18 dan awal abad 19. Perubahan itu ditandai dengan terjadinya revolusi Perancis yang mengawali perubahan tatanan lama masyarakat Eropa menuju tatanan baru yang lebih demokratis. Segera setelah itu terjadi revolusi industri yang menyebabkan munculnya negara-negara Eropa sebagai negara produsen barang-barang murah yang memerlukan daerah pemasaran. Segala perubahan tersebut tentu berdampak terhadap wilayah-wilayah koloni negara-negara Eropa yang ada di Asia dan Amerika.

Khusus di kepulauan Indonesia perubahan-perubahan yang berlangsung memunculkan berbagai reaksi yang seringkali berujung pada konflik secara terbuka. Selain perlawanan

¹ This file is only used as Paper for 'Koentjaraningrat Memorial Lecture XI/2014' only and remains the property of Forum Kajian Antropologi Indonesia and the writer. No part of it may be reproduced by any means without prior written permission of Forum Kajian Antropologi Indonesia or the writer.

² Rought draft, do not quote without permission from Bondan Kanumoyoso

³ Baru-baru ini terbit karya komprehensif tentang Diponegoro yang terdiri dari tiga jilid. Lihat Peter Carey, *Kuasa Ramalan: Pangeran Diponegoro dan Akhir Tatanan Lama di Jawa, 1785-1855*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2012. Karya ini merupakan terjemahan dari *The Power of Prophecy: Prince Diponegoro and the End of an Old Order in Java, 1785-1855*, Leiden: KITLV Press, 2008.

Diponegoro, di berbagai bagian Indonesia juga terjadi perlawanan terhadap kekuatan kolonial. Sebagai contoh, di akhir abad 18 di Kepulauan Maluku muncul perlawanan Pangeran Nuku dari Tidore. Sementara itu dalam waktu yang hampir bersamaan dengan Perang Jawa, di Sumatra Barat terjadi perlawanan kaum ulama terhadap kekuatan kolonial yang dikenal dengan Perang Paderi (1821-1838).⁴ Sementara itu sejak pertengahan abad 19 di Jawa terjadi banyak perlawanan kaum petani yang diilhami oleh gagasan tentang Ratu Adil yang inspirasinya sangat mungkin datang dari perlawanan yang dilakukan oleh Diponegoro.⁵ Sebelum membahas sosok Diponegoro dalam sejarah Indonesia, dalam bagian selanjutnya akan dibahas secara singkat perlawanan terhadap kekuatan kolonial yang dilakukan oleh dua tokoh yang namanya telah disebut di atas.

Perlawanan Pangeran Nuku dari Tidore

Kemungkinan untuk mendapatkan untung yang besar dari perdagangan rempah-rempah di Maluku berupa cengkeh dan pala merupakan hal yang tidak bisa ditolak oleh para pedagang dari Eropa. Meskipun rempah-rempah dihasilkan di Kepulauan Maluku, tetapi para penguasa Maluku sepanjang abad 17 dan 18 bukanlah pihak yang paling memiliki otoritas dalam pengaturan kegiatan perdagangannya. Mereka tidak bisa menegakkan otoritas dalam perdagangan rempah-rempah karena mereka tidak mempunyai kekuatan politik dan militer yang cukup untuk melindungi sumber daya yang berharga ini. Datangnya kekuatan Eropa, terutama Belanda melalui VOC (*Verenigde Oost-Indische Compagnie* / Maskapai Dagang Hindia Timur), secara pasti telah mengakhiri kemungkinan para penguasa dan pedagang lokal untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal dari perdagangan rempah-rempah.

Keberhasilan VOC dalam menegakkan monopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku ditunjang oleh keunggulan mereka dalam teknologi perkapalan, senjata, dan organisasi. VOC adalah perusahaan dagang modern yang memiliki kekuatan modal yang sangat besar untuk ukuran jaman. Perusahaan ini juga dibekali dengan hak-hak istimewa, yaitu hak *oktrooi*, yang diberikan oleh negeri Belanda yang menjadikannya bagaikan negara.⁶ Penaklukan Banda pada tahun 1621 dan dilanjutkan dengan pertempuran sengit yang berkepanjangan dalam peperangan Ambon selama paruh pertama abad 17 menandai awal dominasi VOC di Kepulauan Maluku. Keberhasilan VOC dalam melakukan monopoli perdagangan cengkeh dan pala selama kurang lebih 150 tahun merupakan hasil kombinasi yang cermat dari penggunaan kekuatan militer, pengaturan kegiatan perdagangan yang terorganisasi baik, sikap fleksibel terhadap dinamika politik lokal, dan jaringan informasi yang unggul.

⁴ M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*, Jakarta: Serambi, 2008, hal. 318.

⁵ Tentang perlawanan kaum petani di Jawa pada abad 19 dan awal abad 20 lihat Sartono Kartodirdjo, *Protest Movement in Rural Java: A Study of Agrarian Unrest in the Nineteenth and early Twentieth Centuries*, Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1973.

⁶ Hak *oktrooi* mulai diberikan oleh pemerintah Republik Belanda sejak VOC didirikan pada tahun 1602 dan diperbaharui setiap 21 tahun. Hak-hak itu meliputi hak untuk melakukan perjanjian dengan negara lain, hak untuk merekrut tentara, hak untuk mencetak uang, hak untuk menyatakan perang, dan hak-hak istimewa lainnya.

Meskipun demikian, dominasi kekuasaan VOC bukan tidak mendapat tantangan. Salah satu tantangan yang paling serius datang dari perlawanan yang dilakukan oleh Pangeran Nuku di akhir abad 18. Nuku adalah seorang pejuang yang tangguh. Ia dilahirkan sebagai seorang pangeran Tidore (lahir antara 1725-1735), dan wafat sebagai Sultan Tidore pada 1805.⁷ Perlawanan Nuku terhadap VOC dipicu oleh ditandatanganinya traktat tahun 1780. Dalam traktat tersebut kesultanan Tidore tidak lagi disebut sebagai sekutu VOC melainkan sebagai vasal. Status ini menyebabkan Tidore sejak itu memiliki kedudukan yang sama dengan kesultanan Ternate yang telah diturunkan menjadi vasal sejak tahun 1683. Traktat 1780 dilihat oleh Pangeran Nuku dan para pendukungnya sebagai akhir dari periode Tidore sebagai negara merdeka.

Perlawanan Nuku segera mendapat dukungan dari masyarakat yang ada di wilayah-wilayah pinggir kesultanan ini. Dukungan kepada Nuku datang dari orang Papua di Raja Ampat, Orang Gamrange dari Halmahera Tenggara, dan Orang Seram Timur. Kelompok-kelompok masyarakat ini telah terhubung dengan Tidore selama lebih dari satu abad. Mereka dipersatukan oleh pengalaman bersama dalam perdagangan dan dalam menghadapi dominasi kekuatan kolonial. Nuku tidak melancarkan perlawanannya dari wilayah pusat Tidore. Untuk menghindari penangkapan pasukan VOC, ia berkali-kali berpindah tempat antara Seram Timur, Halmahera, dan Raja Ampat. Selama pelariannya keluar dari pusat Tidore ia harus bertempur menghadapi tiga pusat kekuasaan VOC di Maluku, yaitu di Ternate, Ambon, dan Banda.

Fakta yang sangat menarik adalah bahwa Nuku tidak hanya berperang melawan VOC. Selama masa perlawanannya yang mencakup periode sekitar dua puluh tahun ia juga bertempur melawan rajanya sendiri, yaitu sultan Tidore. Selain itu ia juga berperang dengan Sultan Ternate dan Sultan Bacan. Para penguasa lokal yang berperang dengan Nuku tersebut dapat dikatakan secara militer lebih unggul karena mereka didukung oleh VOC. Tetapi Nuku dapat tetap bertahan dan bahkan beberapa kali mencapai kemenangan karena strateginya yang tepat dalam menggunakan sumber daya yang dia miliki dan dalam memanfaatkan jaringan perlawanan yang dia bangun.

Menurut sejarawan Belanda Haga, Nuku bukanlah pangeran tradisional yang melakukan perlawanan secara konvensional.⁸ Dalam menggalang perlawanan Nuku berhasil membangun komunikasi yang baik dengan para pengikutnya yang terdiri dari berbagai macam etnis. Komunikasi dengan kelompok multi-etnis ini tentulah merupakan tantangan yang sulit. Rahasia keberhasilannya adalah kemampuan Nuku dalam memanfaatkan para penerjemah lokal dan di saat-saat tertentu menggunakan bahasa Melayu sebagai *lingua franca*. Lebih jauh lagi Nuku tidak hanya berkomunikasi dengan penduduk yang menjadi pendukungnya, ia juga berusaha menjangkau dunia yang lebih luas melalui cara membuka hubungan dengan orang Inggris.

⁷ Lihat Muridan Widjojo, *Pemberontakan Nuku: Persekutuan Lintas Budaya di Maluku-Papua Sekitar 1780-1810*, Jakarta: Komunitas Bambu, 2013, hal. 1.

⁸ Pendapat Haga ini dikutip dalam *Ibid.*, hal. 337.

Perlawanan yang didasarkan pada persekutuan yang mengatasi perbedaan budaya telah membuat Nuku berhasil kembali ke tanah kelahirannya. Ia meninggalkan Tidore dengan mendapat cap sebagai pemberontak dari VOC, tetapi ia dapat kembali dan bahkan menjadi sultan tanpa perlawanan yang berarti. Lebih jauh lagi Nuku bisa membangun Tidore sebagai kesultanan yang terkuat mengungguli kesultanan-kesultanan lainnya di Maluku.

Imam Bonjol dan Gerakan Padri

Berbeda dengan dunia Maluku yang merupakan wilayah penghasil rempah-rempah yang sumber kehidupannya berasal dari kegiatan perdagangan maritim, Sumatra Barat merupakan wilayah pertanian yang menghasikan beberapa komoditi yang bisa diekspor seperti emas dan kopi. Tidak seperti masyarakat Maluku yang bercorak multietnis, mayoritas dari masyarakat Maluku adalah orang Minangkabau. Mereka hidup di dataran tinggi yang berlembah yang merupakan bagian dari deretan pegunungan yang disebut dengan Bukit Barisan yang terletak di Pulau Sumatra bagian tengah. Ada empat lembah di Bukit Barisan yang menjadi pusat kehidupan orang Minangkabau. Keempat lembah tersebut terpisah satu dengan lainnya oleh bukit-bukit berbatu dan masing-masing terletak di dekat sebuah gunung berapi.⁹

Agama Islam mulai masuk ke Minangkabau pada abad 16. Kemampuan kerajaan Minangkabau dalam menegakkan kekuasaannya ditunjang oleh keberhasilannya dalam mengelola daerah-daerah penghasil emas. Daerah penghasil utama emas di Minangkabau adalah desa-desa yang terletak di Tanah Datar. Pada tahun 1780-an sumber-sumber emas semakin menyusut, dan ini mengakibatkan terjadinya perubahan dalam masyarakat Minangkabau. Menurunnya arti penting emas segera digantikan oleh sumber-sumber ekonomi baru, yaitu kopi, garam, gambir dan tekstil. Wilayah-wilayah perdagangan komoditi ini terutama terletak di pegunungan Agam dan Lima Puluh Kota. Daerah-daerah ekonomi baru tersebut mengadakan hubungan dagang dengan Amerika dan Inggris.

Kegiatan perdagangan yang berkembang di Agam menyebabkan daerah itu menjadi pusat dari gerakan pembaharuan Islam. Pada sekitar awal abad 19, tepatnya sekitar tahun 1803-4, gerakan pembaharuan Islam yang semakin berkembang tersebut mulai dikenal dengan sebutan gerakan Padri. Kata Padri berasal dari sebutan "orang pidari" atau orang dari Pedir yaitu mereka yang pergi ke Mekkah untuk naik haji melalui pelabuhan Pedir (Pidie) yang ada di Aceh.¹⁰ Suatu upaya untuk melakukan pembaharuan Islam di Minangkabau dipelopori oleh para pedagang yang berasal dari Agam dan Lima Puluh Kota. Mereka melihat bahwa hukum Islam yang dibawa oleh kaum pembaharu di jazirah Arab dapat memberi perlindungan terhadap kegiatan perdagangan yang mereka lakukan.

Pada awal tahun 1803 kota Mekkah berhasil ditaklukkan oleh kaum pembaharu Islam yang dikenal dengan sebutan kaum Wahabbi. Mereka merupakan penganjur pembersihan Islam dari ketidakmurnian. Dalam sejarah Islam, di masa-masa krisis sering terjadi gerakan besar

⁹ Christine Dobbin, *Gejolak Ekonomi, Kebangkitan Islam, dan Gerakan Padri: Minangkabau 1784-1847*, Jakarta: Komunitas Bambu, 2008, hal. 4.

¹⁰ Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, hal. 311.

kebangkitan kembali kesadaran beragama. Gerakan ini biasanya ditandai dengan aspek politik dan militer yang kuat serta didasarkan pada pembedaan yang tegas. Berdasarkan inspirasi yang diberikan oleh kaum Wahabi, para Haji yang baru pulang dari Mekkah menyebarkan gagasan untuk melakukan pembaharuan Islam di kalangan masyarakat Minangkabau.¹¹ Dengan menyebut dirinya sebagai kaum padri mereka menentang perjudian, sabung ayam, penggunaan candu, minuman keras, dan ketaatan yang lemah terhadap kewajiban-kewajiban yang ada dalam agama Islam.

Para guru agama di Minangkabau diberi gelar kehormatan "tuanku". Gelar kehormatan ini pula yang digunakan oleh para pimpinan kaum Padri. Salah satu pimpinan gerakan Padri yang terkemuka adalah Tuanku Imam Bonjol (1772-1864). Gerakan pembaharuan yang dilakukan oleh kaum Padri di Minangkabau mendatangkan reaksi yang keras dari kelompok masyarakat lainnya yang dipimpin oleh para pemuka yang disebut dengan penghulu (para kepala suku dan pemimpin adat). Para penentang gerakan Padri adalah masyarakat Minangkabau yang mendiami wilayah Tanah Datar dan dataran-dataran rendah lainnya yang tidak banyak terlibat dalam kegiatan perdagangan. Pertentangan yang terjadi berujung pada konflik terbuka. Pada tahun 1815 sebagian besar keluarga kerajaan Minangkabau yang terletak di Tanah Datar terbunuh oleh kaum Padri.

Setelah berhasil mengalahkan kekuatan penentang utamanya, gerakan Padri mulai meluaskan pengaruhnya ke Tapanuli Selatan. Di wilayah tersebut kaum Padri melakukan apa yang mereka sebut sebagai pemurnian agama. Di sisi lain, ada yang beranggapan bahwa apa yang dilakukan oleh kaum Padri terhadap orang Mandailing yang mendiami wilayah Tapanuli Selatan adalah agresi yang diiringi dengan penjarahan dan berbagai tindak kejahatan lainnya.¹² Kemenangan kaum Padri segera mendapat tantangan yang serius dengan kembali berkuasanya orang-orang Belanda di Padang pada tahun 1819. Para penghulu yang anti kaum Padri dan para anggota keluarga kerajaan yang masih hidup segera meminta bantuan kekuatan kolonial lama tersebut.

Selama berlangsungnya Perang Jawa, Belanda tidak dapat mengerahkan kekuatan penuh dalam menghadapi kaum Padri di bawah pimpinan Tuanku Imam Bonjol. Setelah tahun 1830 perang antara Belanda melawan kaum Padri semakin berkobar. Pintu-pintu yang menyuplai logistik bagi kaum Padri berhasil diblokade. Blokade dilakukan Belanda dengan menutup pesisir barat dan pesisir timur Sumatra bagian tengah yang merupakan pintu gerbang perdagangan Minangkabau. Pada tahun 1837, basis kekuatan utama kaum Padri di Bonjol berhasil direbut Belanda. Ketika pusat kekuatan utama kaum Padri tersebut direbut, Tuanku Imam Bonjol berhasil melarikan diri. Tetapi pelariannya tidak berlangsung lama, karena ia kemudian menyerah. Tuanku Imam Bonjol dihukum dengan cara diasingkan. Pertama ke

¹¹ Dobbin, *Gejolak Ekonomi*, hal. 203-204.

¹² Kontroversi dari gerakan Padri yang meluaskan pengaruhnya ke wilayah Tapanuli Selatan dibahas dalam M.O. Parlindungan, *Pongkinangolngolan Sinambela gelar Tuanku Rao: Teror Agama Islam Mazhab Hambali di Tanah Batak, 1816-1833*, Yogyakarta: LkiS, 2006. Lihat juga Basyral Hamidi Harahap, *Greget Tuanku Rao*, Jakarta: Komunitas Bambu, 2007.

Priangan, kemudian ke Ambon, dan terakhir ke Manado, tempat di mana ia wafat pada tahun 1864.

Diponegoro dan Perubahan Tatanan di Jawa

Sebagai tokoh sejarah kehidupan Diponegoro terikat dalam ruang dan waktu. Sebagai seorang pangeran yang berasal dari kesultanan Yogyakarta, budaya Jawa dengan kental mewarnai pandangan hidup Diponegoro. Salah satu tujuan utama dari perlawanannya adalah mengembalikan tatanan budaya Jawa seperti sebelum kekuatan kolonial masuk terlalu dalam ke kehidupan masyarakat Jawa. Dalam pandangan Diponegoro, Jawa adalah wilayah inti Mataram, yaitu daerah yang ada di Jawa Tengah bagian selatan. Selama kekuatan kolonial dan kekuatan asing lainnya tidak masuk ke wilayah tersebut, menurut Diponegoro orang Jawa akan dapat tetap mempertahankan kedaulatannya.

Meskipun sepanjang abad ke-18, kekuatan VOC secara bertahap meluas dari Batavia ke Priangan, Banten dan Pantai Utara Jawa, namun selama kekuatan tersebut tidak masuk ke wilayah inti Mataram bagi Diponegoro kehadirannya masih dapat diterima. Masuknya VOC terlalu dalam ke kehidupan keraton di awal abad 19, khususnya kesultanan Yogyakarta, telah menyebabkan Diponegoro dan para elit keraton lainnya merasa bahwa kekuatan asing tersebut telah merusak tatanan budaya Jawa.

Diponegoro merupakan anak jamannya. Ia hidup dalam masa peralihan (1785-1855), yaitu ketika kekuasaan VOC di Jawa telah surut, sementara negara kolonial Hindia Belanda yang melanjutkan kekuasaan VOC mulai tumbuh menjadi mantap dengan diselingi oleh periode pendek pemerintahan Belanda-Prancis di bawah Gubernur Jendral H.W. Daendels (1808-1811) dan pemerintah Inggris di bawah Letnan Gubernur T.S. Raffles (1811-1816). Meskipun dua selingan pendek pemerintahan Daendels dan Raffles mencakup periode yang tidak sampai sepuluh tahun, tetapi dampaknya sangat fundamental dalam merubah tatanan kehidupan masyarakat Jawa.

Sebagai pembawa gagasan revolusi Revolusi Perancis, Daendels melakukan reorganisasi pemerintahan dengan memasukkan elit Jawa ke dalam sistem administrasi kolonial dan karena itu ia telah meletakkan landasan bagi suatu administrasi pemerintahan yang modern. Selain melakukan reorganisasi pemerintahan Daendels juga dikenang sebagai orang yang membangun sarana infrastuktur yang paling monumental di Jawa, yaitu jalan Anyer-Panarukan atau *Grote Postweg* (Jalan Raya Pos).¹³ Sementara Raffles dalam masa kekuasaannya menerapkan sistem pajak tanah (*land rent system*) untuk menggantikan sistem pungutan wajib (*verplichte leveransier*) yang diterapkan pada masa VOC. Penerapan *land rent system* menurut sistem pajak tanah yang diterapkan Inggris di India, namun terbukti cukup sulit untuk

¹³ Leonard Blussé, "Changes of Regime and Colonial State Formation in the Malay Archipelago, 1780-1830—an invitation to an international research project", ARI Working Paper, No. 41, May 2005, www.ari.nus.edu.sg/pub/wps.htm, hal. 7-8.

diterapkan di Jawa. Penerapan sistem pajak tanah menyebabkan meningkatnya monetisasi (penggunaan uang) di daerah pedesaan di Jawa.¹⁴

Perubahan-perubahan besar yang menyebabkan terguncangnya tatanan Jawa yang dikenal dengan akrab oleh Diponegoro tentu telah mendatangkan kekecewaan yang besar terhadap dirinya. Salah satu tuntutan utama Diponegoro yang melatar belakangi perlawanannya terhadap kekuatan kolonial adalah kembalinya tatanan Jawa seperti sebelum terjadinya reformasi Daendels pada tahun 1808.¹⁵ Perlawanan Diponegoro terhadap kekuatan kolonial menjadi berbeda dengan perlawanan yang dilakukan oleh para bangsawan keraton sebelumnya karena Diponegoro banyak memasukkan aspek Islam di dalam perjuangannya. Kesalehan Diponegoro dan cita-citanya untuk menegakkan ajaran agama Islam dalam masyarakat Jawa menyebabkannya mendapat dukungan yang luas. Dukungan bagi Diponegoro bukan hanya datang dari para pendukungnya di lingkungan keraton dan para petani, tetapi juga dari kaum santri yang berasal dari berbagai pesantren yang ada di pedalaman Jawa.

Dalam pandangan masyarakat Jawa abad 19 Diponegoro adalah seorang Ratu Adil. Sebagai seorang yang dianggap sebagai Ratu Adil, Diponegoro berhasil menyatukan berbagai elemen sosial yang berbeda di bawah cita-cita Islam Jawa. Hilangnya sosok pemimpin yang bisa melindungi rakyat, menyebabkan masyarakat Jawa berpaling kepada Diponegoro dan melihatnya sebagai seorang tokoh yang bisa memandu mereka melewati masa transisi yang sulit untuk menuju ke masa kejayaan. Pesona Diponegoro di kalangan pendukungnya terletak pada kemampuannya untuk memberi harapan di tengah penderitaan yang disebabkan oleh penetrasi kekuatan kolonial yang semakin dalam, terutama sejak masa pemerintahan Daendels.

Di luar kelaziman kehidupan seorang pangeran di jamannya, sebagai putra seorang sultan, Diponegoro justru dibesarkan di luar tembok keraton. Di bawah asuhan neneknya yang memegang kuat ajaran agama, Diponegoro tumbuh menjadi seorang pangeran yang religius. Diponegoro menjadi dewasa dengan dikelilingi oleh para ulama dan kiai sehingga ekspresi keislamannya tidak hanya sebatas pada pelaksanaan kewajiban-kewajiban dasar Islam, tetapi lebih jauh dari itu, ia juga mengembangkan suatu gagasan keagamaan yang cukup mendalam. Cita-citanya untuk menjadi penata agama Islam di tanah Jawa menunjukkan bahwa agama bagi Diponegoro tidak hanya menjadi identitas tetapi merupakan bagian utama dari cita-citanya, yaitu mewujudkan masyarakat Jawa yang taat kepada agama Islam.

Perlawanan yang dilakukan oleh Diponegoro merupakan sebetulnya perlawanan yang melampaui jamannya. Hal ini karena karena perlawanan tersebut tidak sekedar berakar pada masalah internal di kalangan elit tradisional. Perang Jawa menjadi suatu titik penting dalam sejarah Indonesia karena dalam perang ini dukungan masyarakat yang luas diberikan karena Diponegoro mempunyai empati yang mendalam terhadap penderitaan sosial ekonomi yang dialami oleh rakyat kebanyakan. Menurut sejarawan Peter Carey, perang Jawa menjadi sangat

¹⁴ Mengenai *land rent system* lihat Peter Boomgaard, *Anak Jajahan Belanda: Sejarah Sosial dan Ekonomi Jawa 1795-1880*, Jakarta: Djambatan dan KITLV, 2004, hal. 57-61.

¹⁵ Peter Carey, *Takdir: Riwayat Pangeran Diponegoro (1785-1855)*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2014, hal. 90.

bermakna karena saling pengaruh yang mendalam antara derita ekonomi dan harapan akan datangnya jaman keemasan menciptakan suatu gerakan berwawasan sosial yang unik yang mendahului gerakan kebangsaan Indonesia pada awal abad ke-20.¹⁶

Kesimpulan

Periode akhir abad 18 dan awal abad 19 merupakan masa transisi dalam sejarah dunia. Revolusi Perancis yang diikuti dengan revolusi industri telah mengubah dunia dalam pengertian yang mendasar. Sejak itu tatanan lama di dunia Barat mulai ditinggalkan dan gagasan-gagasan yang lebih memberi peluang kebebasan kepada masyarakat semakin mengemuka. Efek kejut dari perubahan-perubahan tersebut segera melanda kekuatan-kekuatan kolonial lama. salah satu diantaranya adalah Belanda. Selama abad 17 dan 18 Belanda merupakan salah satu kekuatan perdagangan dunia. VOC adalah salah satu perusahaan multinasional utama yang menempatkan bangsa Belanda dalam periode itu sebagai salah satu bangsa yang terkemuka di Eropa. Tetapi memasuki abad ke-19 status Belanda mengalami penurunan drastis. VOC harus ditutup diakhir abad 18 karena bangkrut, sementara sejak tahun 1795 Belanda diduduki oleh tentara Perancis.

Dalam konteks dunia yang sedang mengalami transisi besar tersebut, muncul tokoh-tokoh di Indonesia yang mencoba untuk memberikan respon terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Nuku dengan strategi aliansi lintas budayanya telah berhasil mengatasi kekuatan kolonial Belanda yang dipusatnya mengalami pelemahan tetapi di tingkat lokal masih tetap dominan. Berbeda dengan para pemimpin perlawanan lainnya, perlawanan Nuku berujung pada kemenangan. Pangeran dari Tidore ini tidak pernah bisa ditangkap atau dikalahkan. Sementara itu, perubahan-perubahan besar yang melanda masyarakat Minangkabau telah memunculkan gerakan Padri yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Cita-cita pemurnian agama yang diusung oleh gerakan ini harus menghadapi realita. Pemerintah kolonial tidak bisa mentoleransi adanya kekuatan lokal yang ingin menegakkan otoritas politik dan keagamaan.

Berbeda dengan Pangeran Nuku dan Tuanku Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro berusaha memadukan cita-cita yang berladaskan pada nilai-nilai yang berakar pada budaya Jawa dan agama Islam. Gagasan perjuangan diponegoro berhasil menarik simpati rakyat Jawa secara luas. Dukungan masyarakat Jawa diberikan kepada Diponegoro, karena ia tidak sebatas memperjuangkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Lebih jauh lagi, Diponegoro ingin mengakhiri penderitaan dan rasa terhina masyarakat Jawa yang diakibatkan oleh berbagai kebijakan pemerintah kolonial yang mengalami perubahan mendasar di awal abad 19. Pada masanya, cita-cita perjuangan Diponegoro hanya dapat diterima dalam lingkup budaya dan masyarakat Jawa. Agaknya momentum sejarah ketika itu belum memihak kepada Diponegoro. Meski demikian, kisah perjuangan Diponegoro merupakan sumber inspirasi yang kaya bagi dunia pergerakan nasional Indonesia, revolusi kemerdekaan, dan bahkan hingga saat ini.

¹⁶ *Ibid.*, hal. 26.